

## ABSTRAK

Kepercayaan publik terhadap pemerintah pada perkembangannya belum begitu optimal. Pemerintah perlu mengupayakan pemerintahan yang partisipatif untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemerintahan partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik, dan mendeskripsikan peningkatan kepercayaan publik melalui pemerintahan partisipatif di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan teori karakteristik pemerintahan partisipatif (Hill & Hupe) dan teori kepercayaan publik (Dwiyanto). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, serta wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai proses pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Kemudian, untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 relatif partisipatif. Hal ini karena dari delapan karakteristik yang melekat pada pemerintahan partisipatif, terdapat enam karakteristik yang sudah terlaksana, dan hanya dua karakteristik pemerintahan partisipatif yang belum optimal. Sedangkan kepercayaan publik dalam bentuk politik terhadap pemerintah relatif mengalami kenaikan namun kepercayaan publik dalam bentuk sosial relatif belum optimal.

**Kata Kunci : Pemerintahan, Pemerintahan Partisipatif, Kepercayaan Publik**

## ABSTRACT

*The development of public trust in the government has not been optimal. The governments need to seek participatory governance to increase public trust. The purpose of this study to describe the implementation of participatory governance, conducted in Bojonegoro District on “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013” about The Management of Development Innovation based on Public Participation, and to describe the increase of public trust through participatory governance in Bojonegoro District.*

*This study uses the theory of characteristic of partisipatory governance (Hill and Hupe) and the theory of public trust (Dwiyanto). Then, this study uses qualitative research method with descriptive research type. While the data collection techniques has been done by observation, study documents, and in-depth interview with informants. Determination of informants is done by purposive sampling technique that is party who considered to know more about the implementation process of “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013” about The Management of Development Innovation based on Public Participation. Then, to ensure the validity of the data in this study used triangulation techniques. Furthermore, data analysis techniques has been done by way of data reduction, data presentation and conclusion.*

*The results of this study indicate that the implementation process of “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013” about The Management of Development Innovation based on Public Participation, is relative participatory. This is because of the eight characteristics attached to the characteristics of participatory governance, there are six of them already reflected in the implementation process, and there are still two characteristics of participatory governance that have not been fully optimal. Beside of that, the public trust of government in political, tend to increase. But, the public trust in social, tend to don't be optimal yet.*

*Keywords: Governance, Participatory Governance, Public Trust*